

LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN SURVEI
PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
KELAS IB

PERIODE 1 APRIL – 30 JUNI 2025

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI ZI PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023.

Disahkan di Purbalingga
Pada Hari Selasa, 1 Juli 2025

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga



Dr. Eko Julianto S.H., M.M., M.H.
NIP. 19780725 200112 1 001

Ketua Tim Survei,



Dyah Winanti, S.H.
NIP. 19651229 199403 2 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	1
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja	2
BAB II METODOLOGI	4
2.1. Metode Penelitian	4
2.2. Populasi Dan Sampel	4
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control	4
2.5. Teknik Analisis Data	5
2.6. Tahapan Pelaksanaan	5
BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	8
3.1. Profil Responden	8
3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden	8
3.1.2. Pekerjaan Responden	8
3.1.3. Jenis Kelamin Responden	9
3.1.4. Kelompok Usia Responden	9
3.2. Indeks Persepsi Korupsi per Indikator	9
3.2.1. Indikator Diskriminasi pelayanan	9
3.2.2. Indikator Kecurangan Pelayanan	11
3.2.3. Indikator Penerimaan Imbalan	12
3.2.4. indikator Pungutan Liar	13
3.2.5. Indikator Percaloan	14
3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	15

BAB IV PENUTUP 22

4.1. Kesimpulan..... 22

4.2. Rekomendasi..... 22

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1. Link Survey Elektronik Pengadilan Negeri Purbalingga
- Lampiran 2. Screenshot pengolahan data nilai per unsur pada website esurvey
- Lampiran 3. Data umum responden

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Halaman
1. Model Alur Penyusunan Survei IPAK Menuju Zona Integritas.....	6
2. Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi	6
3. Nilai Persepsi.....	7
4. Tingkat Pendidikan Responden.....	8
5. Jenis Pekerjaan Responden.....	8
6. Jenis Kelamin Responden	9
7. Usia Responden	9
8. Indeks Pada Indikator Diskriminasi Pelayanan	10
9. Indeks Pada Indikator Kecurangan Pelayanan.....	11
10. Indeks Pada Indikator Penerimaan Imbalan/Hadiah.....	12
11. Indeks Pada Indikator Pungutan Liar (Pungli).....	13
12. Indeks Pada Indikator Percaloan.....	14
13. Indeks Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Purbalingga	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Surat Edaran Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- g) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- h) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021, Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan dibawahnya.
- i) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya berdasarkan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper), pelaksanaan survei dibantu dengan menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

- Penyiapan Bahan
 - a. Aplikasi survei pelayanan elektronik.
 - b. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 5 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner pada Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya tersimpan pada Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper).
<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098036>.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner pada Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan pada tanggal 1 April 2025 s.d. 30 Juni 2025

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Purbalingga.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka melainkan menggunakan data pada Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (siSUPER). Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan atau triwulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan). Pengawas akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks persepsi anti korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi anti korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi anti korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi anti korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1
Model Alur Penyusunan Survei IPAK Menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang Lingkup Survei Indeks Presepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Diskriminasi pelayanan
2	Pelayanan Diluar Prosedur/Kecurangan Pelayanan
3	Penerimaan Imbalan/Hadiah
4	Pungutan Liar (Pungli)
5	Percaloan

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil Responden

3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan mayoritas memiliki latar Pendidikan S1.

Tabel 4.
Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	0	0
3	SMP	1	1,56
4	SMU	18	28,12
5	DI/DII/DIII	5	7,81
6	S1	39	60,93
7	S2/S3	1	1,56
TOTAL		64	100%

3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 35,93 % responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purbalingga memiliki pekerjaan dalam kategori “Swasta”.

Tabel 5.
Jenis Pekerjaan Responden

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentasen (%)
1	PNS	22	34,37
2	TNI/POLRI	8	12,50
3	SWASTA	23	35,93
4	WIRUSAHA	0	0,00
5	TENAGA KONTRAK	2	3,12
6	LAINNYA	9	14,06
TOTAL		64	100%

3.1.3. Jenis Kelamin Responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar jenis kelamin, responden paling banyak adalah laki-laki sebesar 54,68 %.

Tabel 6
Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	35	54,68
2	Perempuan	29	45,32
TOTAL		64	100%

3.1.4. Kelompok usia responden
Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purbalingga berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia antara 18 tahun s/d 28 tahun.

Tabel 7.
Usia Responden

No	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	18-28	28	43,75
2	29-39	20	31,25
3	40-49	7	10,94
4	50-59	6	9,38
5	>60	3	4,69
6	Tidak mencantumkan umur	0	0
TOTAL		64	100%

3.2. Indeks Persepsi Korupsi per Indikator

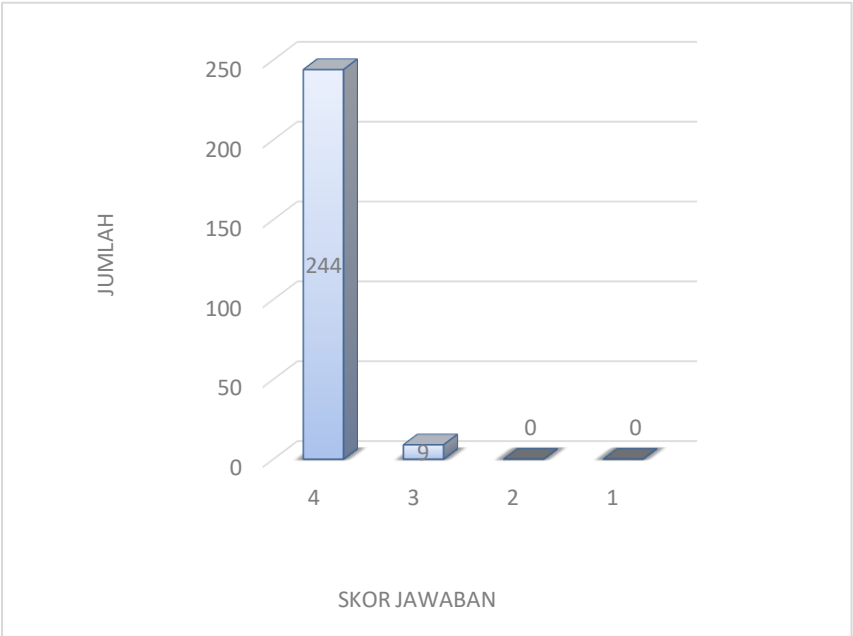
3.2.1. Indikator Diskriminasi Pelayanan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator diskriminasi pelayanan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,953.
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purbalingga Bersih dari Korupsi.

Tabel 9.
Indeks pada Indikator Diskriminasi Pelayanan

6	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Responden	Jumlah
1.	Seluruh petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya	4	61	244
2.	Sebagian besar petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya	3	3	9
3.	Sebagian kecil petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya	2	0	0
4.	Seluruh petugas pada pengadilan pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya	1	0	0
Jumlah			64	253
Nilai Rata-Rata			3,953	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut:



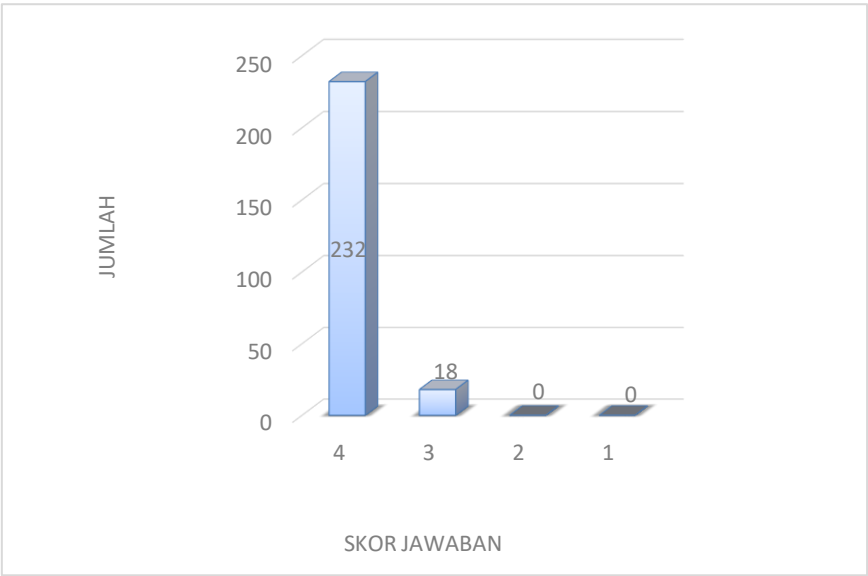
3.2.2. Indikator Pelayanan Diluar Prosedur/Kecurangan Pelayanan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,906. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purbalingga Bersih dari Korupsi.

Tabel 10.
Indeks pada Indikator
Pelayanan Diluar Prosedur/Kecurangan Pelayanan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Responden	Jumlah
1.	Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan	4	58	232
2.	Sebagian besar pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan	3	6	18
3.	Sebagian kecil pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan	2	0	0
4.	Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas tidak sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan	1	0	0
Jumlah			64	123
Nilai Rata-Rata			3,906	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut:



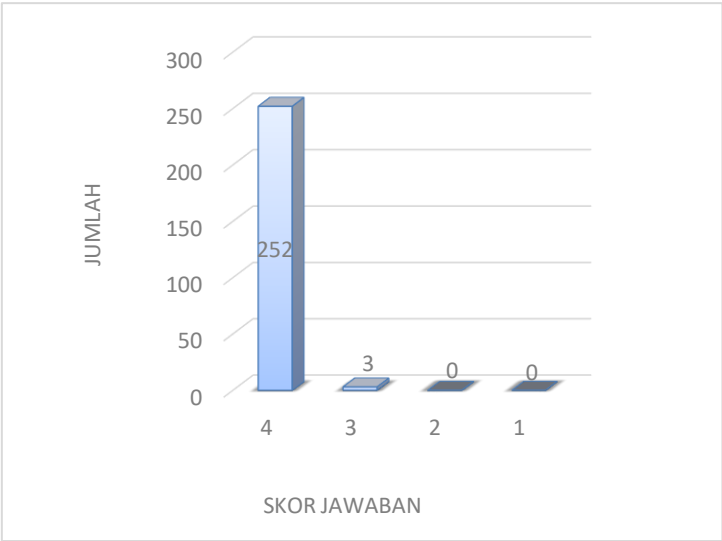
3.2.3. Indikator Penerimaan imbalan/Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penerimaan imbalan/hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 3,984. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purbalingga Bersih dari Korupsi.

Tabel 11.
Indeks pada Indikator Penerimaan imbalan/Hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Responden	Jumlah
1.	Petugas pelayanan tidak pernah menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll] diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan	4	63	252
2.	Sebagian besar petugas pelayanan tidak pernah menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll] diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan	3	1	3
3.	Petugas pelayanan sering menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll] diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan	2	0	0
4.	Petugas pelayanan selalu menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll] diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan	1	0	0
Jumlah			64	255
Nilai Rata-Rata			3,984	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut:



3.2.4. Indikator Pungutan Liar (Pungli)

Dari skala sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator pungutan liar (pungli) ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000.

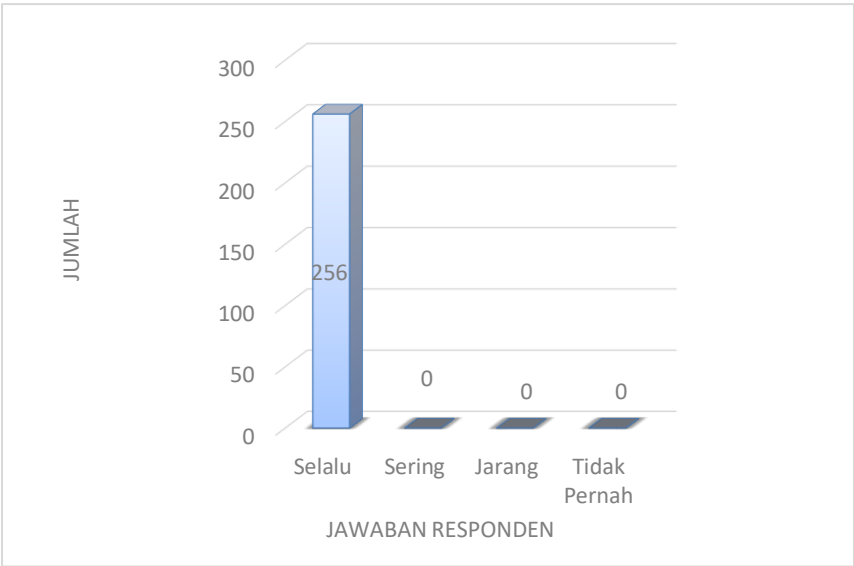
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purbalingga Bersih dari Korupsi.

Tabel 12.
Indeks pada Indikator Pungutan Liar (Pungli)

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Responden	Jumlah
1.	Petugas layanan tidak pernah meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (Uang rokok, uang terima kasih dll)	4	64	256
2.	Sebagian besar petugas layanan tidak pernah meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi sepereti (unag rokok, uang terima kasih dll)	3	0	0
3.	Sebagian besar petugas layanan sering meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)	2	0	0
4.	Sebagian besar petugas	1	0	0

	layanan selalu meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)			
Jumlah			64	256
Nilai Rata-Rata			4,000	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut:



3.2.5. Indikator Percaloan

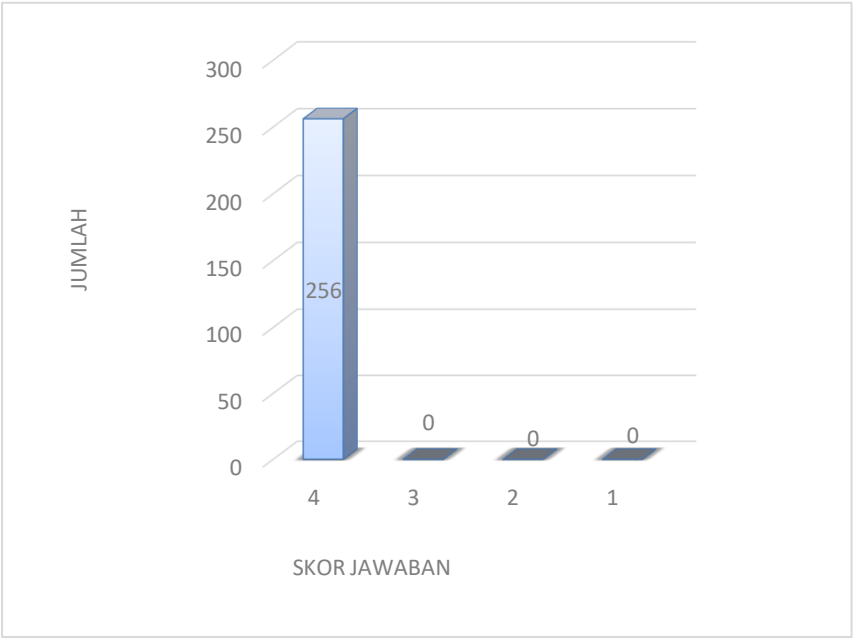
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000.
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purbalingga Bersih dari Korupsi.

Tabel 13.
Tabel Indeks pada Indikator Percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Responden	Jumlah
1.	Seluruh petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan	4	64	256
2.	Sebagian besar petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan	3	0	0
3.	Petugas pelayanan sering melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan	2	0	0
4.	Petugas pelayanan selalu melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan	1	0	0
Jumlah			64	256

Nilai Rata-Rata	4,000
-----------------	-------

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut:

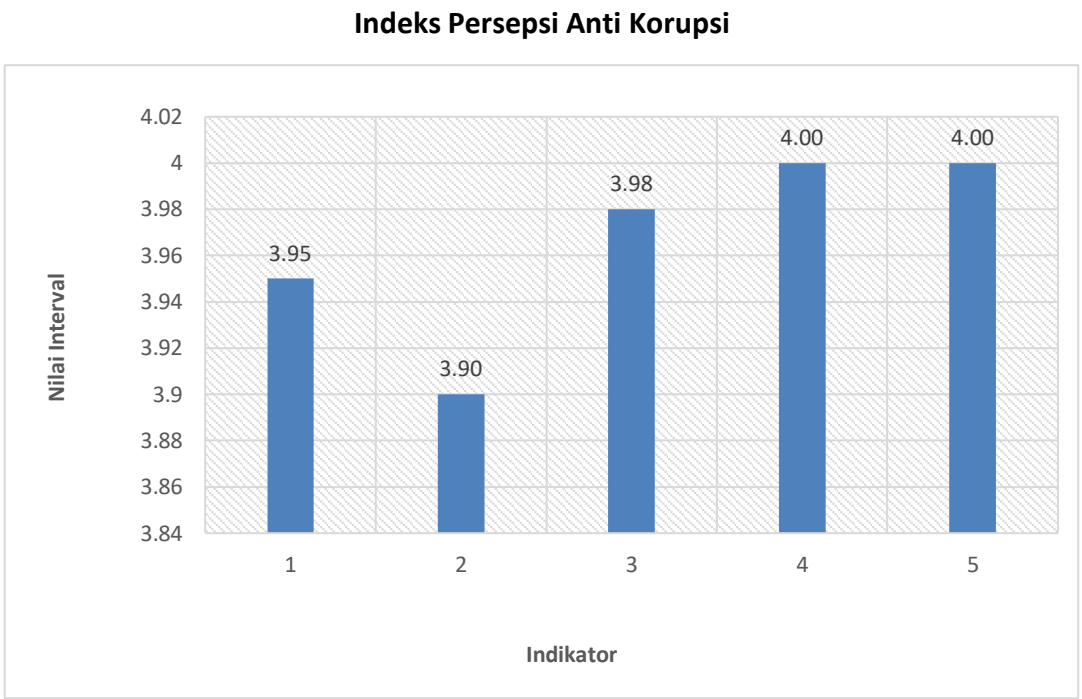


3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 5 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi rata-rata satuan kerja Pengadilan Negeri Purbalingga sebesar 3,97 / 99,22%

Tabel 19.
Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Purbalingga

No	Indikator	Hasil	
		Nilai Interval	Konversi IPAK
1.	Diskriminasi Pelayanan	3,953	98,82
2.	Pelayanan Diluar Prosedur/Kecurangan Pelayanan	3,906	97,65
3.	Penerimaan Imbalan/Hadiah	3,984	99,60
4.	Pungutan Liar (Pungli)	4,000	100,00
5.	Percaloan	4,000	100,00
Nilai Rata-Rata		3,97	99,21



Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purbalingga tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut sebesar 3,97 / 99,22 % masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada angka 81,126 – 100.

Tabel 20.
Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purbalingga

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPAK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil Survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Purbalingga diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Purbalingga memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,97 / 99,21 % atau masuk pada kategori “BERSIH DARI KORUPSI”.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 5 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Diskriminasi Pelayanan, mendapat indeks 3,953
2. Indikator Pelayanan Diluar Prosedur/Kecurangan Pelayanan, mendapat indeks 3,906
3. Indikator Penerimaan Imbalan/Hadiah, mendapat indeks 3,984
4. Indikator Pungutan Liar (Pungli), mendapat indeks 4,000
5. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,000

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Purbalingga tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,26 atau masuk pada persepsi “Bersih dari Korupsi”.

Tindaklanjut dari hasil survey yang sudah dilakukan diharapkan dapat memperbaiki hasil indeks persepsi korupsi Pengadilan Negeri Purbalingga, sehingga kualitas pelayanan di Pengadilan Negeri Purbalingga kepada masyarakat akan menjadi lebih baik.

LAMPIRAN-LAMPIRAN..



JUMLAH	64 RESPONDEN	
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 35 ORANG	
	PEREMPUAN : 29 ORANG	
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 0 ORG
	SD : 0 ORG	Diploma 3 : 5 ORG
	SMP : 1 ORG	S1 : 39 ORG
	SMU : 18 ORG	S2 : 1 ORG
	Diploma 1 : 0 ORG	S3 : 0 ORG
PEKERJAAN	PNS : 22 ORG	SWASTA : 23 ORG
	TNI : 0 ORG	WIRUSAHA : 0 ORG
	POLRI : 8 ORG	TENAGA KONTRAK : 2 ORG
	LAINNYA : 9 ORG	

Pilih Satuan Kerja

Periode Triwulan

Pilih Periode

2025

Tam

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN

Preview Publikasi

Indeks Total

Data Umum Responden

Data Domisili Responden

Data Umur Responden

Data Layanan

Nilai Per Unsur

Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	Keterangan
Jumlah	253	250	255	258	256	
NRR Per RL	3,953	3,906	3,984	4,000	4,000	19,844
NRR Terimbang	0,781	0,781	0,797	0,800	0,800	3,859
IPAK ZI Unit Pelayanan						99,22

EVLUASI NILAI UNSUR

3 Unsur Terendah

3 Unsur Tertinggi

No.	Unsur
1	Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?
2	Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?

sex.php/kontrol_survey_zi/perhitungan_zi/npak/index-tab-2

Apakah tidak ada pelayanan diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?